



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TOTOK BINTORO**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**
3. NHK : **643669**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.457.200.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 670.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 153 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/36 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 450.000.000
6. Tanah Seluas 1768 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 707.200.000
7. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **189.800.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000
2. MOTOR, VESPA EXCEL Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.



180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 31.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 752.678.951

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.430.678.951

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.430.678.951

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.